
KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaan dan bimbinganNya, kegiatan pengkajian dapat diselesaikan dengan baik. Kepada semua pihak yang terlibat, utamanya para peneliti, yaitu Dr. Frits O Fanggidae, M.Si dari Fak. Ekonomi UKAW Kupang, dan Ronald Patrick Constantin, SE, MM dari Fak. Ekonomi UNDANA Kupang, serta para staf Badan Litbang Kota Kupang yang terlibat dalam kegiatan pengkajian ini, Pengelola Dana PEM pada BPM Kota Kupang dan Ketua LPM dan jajarannya, Lurah dan jajarannya, Fasilitator Kelurahan, pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya menyampaikan terima kasih atas peran dan fungsinya masing-masing.

Sebagaimana ditegaskan dalam kerangka acuan kerja kegiatan ini, hal utama yang ingin Pemerintah Kota Kupang ketahui dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui penyaluran Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah, apakah program ini mempunyai dampak bagi peningkatan pendapatan penerima bantuan dan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pengembangannya diwaktu mendatang dapat dilakukan dengan baik.

Jawaban terhadap pertanyaan di atas dapat disimak dalam laporan akhir ini. Kami, sebagai bagian dari Pemerintah Kota Kupang, memberi apresiasi dengan baik terhadap hasil kajian ini. Hendaknya pencapaian atau kinerja program ini sebagaimana tampak pada kajian terhadap responden, serta rekomendasi yang diajukan, menjadi pertimbangan yang baik bagi kita semua, utamanya untuk meningkatkan kinerja program ini di waktu mendatang, serta meningkatkan pendapatan warga Kota Kupang sebagai penerima manfaat langsung program ini.

Demikianlah laporan akhir ini disampaikan kepada semua pihak yang membutuhkannya, dengan harapan akan terjadi diskursus yang positif dan produktif, sehingga diperoleh inspirasi baru yang kreatif untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program ini diwaktu mendatang.

Kupang, 4 Juni 2015

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Kupang

Drs. Gosa Yohannes
Pembina Utama Muda
19590131 198503 1 015

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Ringkasan (Summary).....	iii
Kata pengantar	x
Daftar isi.....	xi
Daftar Tabel	xiii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	2
1.3 Tujuan dan Keluaran.....	2
1.4 Tahapan dan Pelaporan Hasil.....	4
Bab II. Realisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2012-2014.....	8
2.1 Pedoman Implementasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	8
2.2 Pendahuluan.....	8
2.3 Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya.....	9
2.4 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	9
2.5 Pengorganisasian.....	14
2.6 Hak dan Kewajiban Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	17
2.7 Pembiayaan dan Pengendalian.....	17
2.8 Fasilitas Kelurahan.....	18
2.9 Monitoring dan Evaluasi.....	19
2.10 Pengawasan.....	19
Bab III. Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Pengembangan Usaha dan Pendapatan Penerima Bantuan	20
3.1 Gambaran Umum Sample Penerima Bantuan	20
3.2 Pengelolaan Usaha	23
3.3 Perkembangan Skala Usaha.....	30

3.4	Pendalaman Responden Pemula Rantau.....	4
3.5	Evaluasi Hasil Analisa Data.....	6
Bag IV	Identifikasi Permasalahan Usaha Responden.....	40
Daftar Pustaka.....		40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kerangka Pikir Pengkajian.....	8
Tabel 1.1.	Penataan Substansi Kajian	9
Table 3.1.	Gambaran Populasi dan Sampel	23
Tabel 3.2.	Usia dan Tingkat Pendidikan Responden	24
Tabel 3.3.	Jenis Usaha Responden (sebelum dan saat ini).....	25
Tabel 3.4.	Jumlah Bantuan Menurut Lama Usaha responden	26
Tabel 3.5.	Kinerja Responden Dalam Pengembalian Bantuan (pinjaman).....	26
Tabel 3.6.	Gagasan Memulai Usaha dan Perencanaan Usaha	27
Tabel 3.7.	Pelaksanaan Usaha Responden	29
Tabel 3.8.	Penggunaan Tenaga Kerja dan sisitem upahan.....	29
Tabel 3.9.	Curahan Waktu Kerja dan Cara Penjualan	30
Tabel 3.10.	Pencatatan Transaksi dan Penyimpanan Pemasukan	32
Tabel 3.11.	Perhitungan Keuntungan dan Pemisahan Pengeluaran.....	32
Tabel 3.12.	Perkembangan Modal Usaha Responden.....	34
Tabel 3.13.	Perkembangan Jumlah Persediaan Usaha Responden	35
Tabel 3.14.	Perkembangan Jumlah Piutang Usaha Responden	35
Tabel 3.15.	Perkembangan omzet Penjualan Responden.....	36
Tabel 3.16.	Gambaran Omset Penjualan, Biaya Produksi dan Penerimaan Bersih responden	37
Tabel 3.17.	Gambaran Proporsi Penggunaan Penerimaan Bersih Usaha Responden	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang, diikhtiarkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas produktif masyarakat, terutama aktivitas produktif berskala mikro dan kecil. Perhatian pada aktivitas produktif skala mikro dan kecil, didasarkan pada realitas bahwa, jumlah warga Kota Kupang yang memiliki usaha skala mikro dan kecil relatif besar, sehingga kemajuan usaha mikro dan kecil tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Namun demikian, disadari bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang implementasinya dilakukan dalam bentuk bantuan permodalan, tidak serta merta meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi membutuhkan proses pengembangan dalam jangka waktu tertentu, barulah tampak pengaruhnya pada peningkatan pendapatan. Bantuan permodalan, pada dasarnya dimaksudkan untuk menambah persediaan, meningkatkan skala usaha, dan melalui pengelolaan usaha yang baik (effisien), akan berdampak pada peningkatan penerimaan (*revenue*). Selisih antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan adalah keuntungan. Sebagian keuntungan digunakan untuk menambah modal, dan sisanya merupakan kontribusi bagi peningkatan pendapatan (*income*).

Dengan demikian, penting diperhatikan tahapan-tahapan pemanfaatan bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Uraian di atas menunjukkan bahwa, peningkatan pendapatan hanya dapat terjadi, bila bantuan permodalan dapat memberbesar skala usaha dan pengelolaan usaha dapat dilakukan secara efisien. Karena itu, kajian tentang pengaruh program pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, hendaknya dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, No, 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka, BALITBANG (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kota Kupang, berinisiatif untuk melakukan suatu kajian dengan topik Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat, paling kurang untuk mendapatkan gambaran akhir, sampai sejauhmana program pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut telah berjalan pada tahapan yang benar, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.2. Pokok Permasalahan

Mengingat fokus kajian ini hendak mengukur pengaruh program pemberdayaan ekonomi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, dan disadari pula bahwa warga Kota Kupang yang mendapatkan bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi belum mewakili seluruh masyarakat Kota Kupang, maka kajian ini dibatasi pada warga Kota Kupang yang pernah mendapat bantuan permodalan dari implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai tahun anggaran 2013. Dengan pembagian demikian, dapat dikaji sampai sejauhmana individu penerima bantuan permodalan, dalam jangka waktu yang relatif pendek, telah mampu mengembangkan usahanya, sehingga memberi dampak pada peningkatan pendapatan.

1.3. Tujuan dan Keluaran

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka kajian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
2. Menganalisis dampak bantuan permodalan terhadap kinerja usaha kelompok/individu penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis sejumlah faktor yang berkaitan dengan kinerja usaha kelompok/individu penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan

ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.

4. Merumuskan rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang melalui berbagai SKPD di waktu yang akan datang.

Berdasarkan rumusan tujuan di atas, maka hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah:

1. Adanya gambaran lengkap tentang bantuan permodalan yang telah disalurkan kepada kelompok/invidu melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
2. Adanya gambaran yang lengkap tentang profil usaha kelompok/invidu melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
3. Adanya gambaran lengkap tentang dampak bantuan permodalan terhadap kinerja usaha kelompok/individu penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
4. Teridentifikasinya sejumlah faktor yang berkaitan dengan kinerja usaha kelompok/individu penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun anggaran 2013.
5. Adanya rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha penerima bantuan permodalan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang melalui berbagai SKPD di waktu yang akan datang.

1.4. Tahapan dan Pelaporan Hasil Kajian

Tahapan dalam pelaksanaan pengkajian ini mencakup beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Persiapan

Tahapan ini mencakup kegiatan penetapan kerangka acuan kerja (KAK), penugaskan tim peneliti, penyusunan rencana kerja dan instrumen pengumpulan data. Rencana kerja lengkap dan instrumen pengumpulan data disusun oleh peneliti dalam bentuk Laporan Pendahuluan untuk dibahas bersama pihak terkait.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh tim peneliti dibantu staf Balitbangda Kota Kupang. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan oleh tim peneliti dibantu staf Balitbangda Kota Kupang. Hasil analisis data disusun oleh peneliti dalam bentuk Laporan Antara untuk dibahas bersama pihak-pihak terkait.

4. Penulisan Draft Laporan Akhir

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data, tim peneliti menyiapkan kerangka dan menulis draft laporan akhir. Kerangka yang disusun peneliti hendaknya menggambarkan keseluruhan hasil yang ingin dicapai.

5. Pembahasan Draft Laporan Akhir

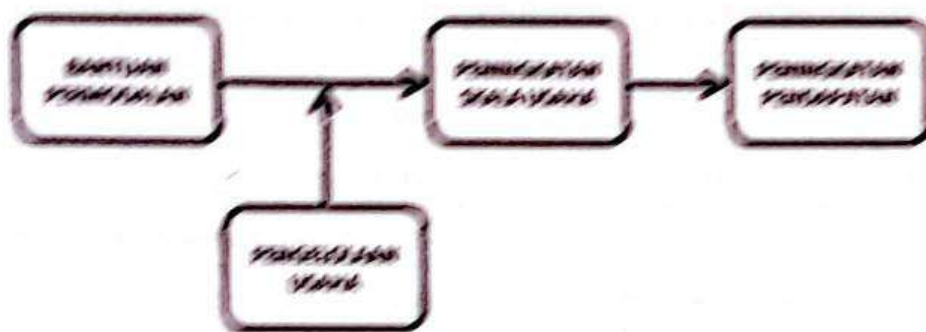
Draft laporan akhir yang disiapkan peneliti dibahas bersama pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan memastikan bahwa laporan akhir telah menggambarkan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

6. Penyusunan Laporan Akhir

Berdasarkan hasil pembahasan draft laporan akhir, peneliti menyiapkan laporan akhir untuk disampaikan kepada Balitbangda Kota Kupang.

1.5. Kerangka Berpikir dan Metode Pengkajian

Kerangka pikir berikut ini menggambarkan keterkaitan dari berbagai aspek substansi penelitian, yang diharapkan dapat memberi pedasarasan rasional terhadap pencapaian tujuan penelitian.



Gambar 1
Konsep Pita Persepsi

Konsep pita di atas menunjukkan bahwa manusia mempunyai sikap serta ingung, mempengaruhi persepsi, yang melalui peningkatan skala usaha. Untuk peningkatan usaha, manusia mempunyai persepsi sebagai variabel independen; peningkatan persepsi sebagai variabel dependen dan skala usaha sebagai moderating variabel. Dengan itu, peningkatan usaha dipersepsi sebagai intervening variabel untuk meningkatkan banyak manusia mempunyai persepsi terhadap peningkatan skala usaha.

Peningkatan variabel independen, dependen, moderating dan intervening dalam konsep pita di atas menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya peningkatan persepsi melalui peningkatan skala usaha, sebagai akibat adanya peningkatan yang baik terhadap manusia mempunyai persepsi. Dalam konteks ini, penting diadahi adanya time lag atau selang waktu yang diperlukan, yaitu suatu proses pengembangan usaha yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Pertama manusia mempunyai persepsi, kemudian waktu tertentu untuk meningkatkan usaha. Dalam kurun waktu tersebut, jika peningkatan usaha dilakukan dengan baik, diharapkan skala usaha akan meningkat. Peningkatan skala usaha dapat diukur dari peningkatan volume transaksi, yang merupakan fungsi dari tingkat perputaran modal usaha. Semakin cepat perputaran modal usaha, volume transaksi semakin meningkat, yang berakibat pada meningkatnya revenue (pendapatan). Pendapatan dikurangi biaya menghasilkan keuntungan. Sebagian keuntungan digunakan untuk menambah modal usaha, dan sisanya adalah kontribusi terhadap peningkatan pendapatan.

Dengan penjelasan demikian, banyak bahwa antara manusia mempunyai persepsi dan peningkatan pendapatan terdapat jarak yang cukup jauh. Manusia mempunyai persepsi yang banyak pada peningkatan pendapatan. Kontribusi berpikir demikian penting

dikemukakan, agar penilaian terhadap hasil analisis dapat dipadukan secara proporsional, serta penanganan terhadap bantuan permodalan perlu memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja usaha kelompok/individu penerima bantuan permodalan. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, disusun metode pengkajian sebagai berikut.

a) Variabel dan Indikator Empirik

Empat variabel yang membentuk kerangka berpikir diatas perlu diukur untuk dianalisis. Proses pengukurannya dilakukan melalui sejumlah indikator profil dan indikator kinerja, yang secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1.
Penataan Substansi Kajian

No	Variabel	Indikator Profil	Indikator Kinerja
1	Bantuan Permodalan	- Jumlah bantuan permodalan menurut SKPD tahun 2008-2014 - Jumlah Kelompok/individu penerima bantuan permodalan	Jumlah persediaan pada tingkat kelompok/individu penerima bantuan
2	Pengelolaan Usaha	- Profil Usaha Kelompok/Individu penerima bantuan permodalan - Perencanaan usaha - Pengelolaan/pengorganisasian usaha - Penatausahaan keuangan	- Effisiensi pengelolaan usaha - Keteraturan pengelolaan usaha - Stabilitas pengelolaan usaha
3	Skala Usaha	- Besaran modal usaha - Jumlah Persediaan - Volume Transaksi	- Tingkat perputaran modal - Akumulasi/pertambahan modal - Tingkat pertambahan persediaan - Peningkatan volume transaksi
4	Pendapatan	Jumlah Penerimaan Bersih (selisih penerimaan dan biaya)	Proporsi penerimaan bersih yang dialokasi untuk tambahan pendapatan

b) Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan

Satuan analisis (populasi) mencakup seluruh kelompok/individu penerima bantuan permodalan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2008-2014. Adapun satuan pengamatan (sampel) atau bagian dari satuan analisis yang akan diamati ditetapkan sebesar 20 persen dari populasi.

Untuk menjamin keterwakilan sampel terhadap populasi, sampling dilakukan dengan teknik *stratified random sampling*. Prosedurnya sebagai berikut:

1. Satuan Pengamatan/Populasi dipilih strata tertentu menurut: tahun penerimaan bantuan permodalan, lokasi (tempat usaha) dan jenis usaha (produksi, perdagangan, jasa)
2. Penetapan kerangka sampling berdasarkan strata atau kelompok populasi
3. Sampel ditetapkan sebesar 20 persen dari setiap strata.
4. Penentuan sumber informasi dari setiap kelompok sampel dilakukan secara acak/random.

c) Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara terhadap sumber informasi (sampel) yang dipilih secara acak/random. Untuk kepentingan ini akan disiapkan pedoman wawancara terstruktur.

Data sekunder berupa data realisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui setiap SKPD terkait pada tahun anggaran 2013. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik studi dokumenter. Dokumen utama yang dijadikan sumber data adalah laporan realisasi penyaluran Dana PEM tahun anggaran 2013 dan pergulirannya.

d) Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam dua bagian, yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Analisis pendahuluan dimaksudkan untuk menggambarkan indikator profil dari setiap variabel. Tujuannya adalah karakteristik usaha dan kecenderungan perkembangan usaha individu penerima bantuan permodalan dapat tergambar dengan baik.

Analisis lanjutan dimaksudkan untuk menggambarkan indikator kinerja dari setiap variabel yang dikaji. Tujuannya agar dampak bantuan permodalan terhadap peningkatan kinerja usaha dapat digambarkan dengan baik. Untuk kepentingan ini akan dilakukan

analisis kinerja keuangan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan terkait skala usaha, tingkat perputaran modal, volume transaksi, tingkat penambahan modal, penerimaan, biaya dan pendapatan bersih.

BAB II

REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
KOTA KUPANG TAHUN 2012-2014

2.1. Pedoman Implementasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.1.1. Pendahuluan

- a) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian.
- b) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha melalui dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
- c) Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dari ketebelakangan dan kemiskinan.
- d) Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang dapat dilihat dari tiga sisi. Yakni : menciptakan suasana iklim usaha yang sehat dan memungkinkan potensi sumber daya masyarakat dan memungkinkan potensi sumber daya masyarakat yang dapat dikembangkan, memperkuat potensi sumber daya masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) berada dibawah kendali Pemerintah Ekonomi Masyarakat dan dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang beserta SKPD Teknis terkait lainnya. Sedangkan operasionalisasi pengelolaan diserahkan kepada LPM di masing-masing Kelurahan.

2.1.2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumberdaya

- a) Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bertujuan untuk penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat berskala kecil.
- b) Dana yang dialokasikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Kupang adalah Dana yang bersumber dari APBD Kota Kupang dalam bentuk hibah kepada LPM dan digulirkan kepada masyarakat.

-
-
- c) Dana PEM yang diberikan kepada masyarakat adalah dana untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada kas LPM yang selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat.

2.1.3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Saran, Prinsip dan Pendekatan

a) Sasaran

Sasaran dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang adalah usaha perorangan berskala kecil yang telah berjalan.

b) Prinsip

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang memiliki prinsip bahwa pemberian Dana PEM untuk penguatan modal usaha dalam bentuk dana bergulir tanpa bunga

c) Pendekatan

Pendekatan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang dilakukan dengan pendekatan Tribina yang bersifat komplementer dan simultan yakni :

1. Bina Manusia

Program PEM tidak semata-mata hanya memberikan modal usaha bergulir tetapi lebih penting adalah meningkatkan wawasan serta merubah perilaku masyarakat, melalui pembinaan, penyuluhan/sosialisasi dan pendampingan sehingga masyarakat penerima manfaat dana PEM dapat merubah pola pikir dan sikap menjadi usahawan yang sukses.

2. Bina Usaha

Disamping menggunakan pendekatan bina manusia, pendekatan bina usaha sangat penting agar usaha yang dijalankan masyarakat menjadi usaha yang berkembang dan sukses dengan pemberian modal usaha bergulir bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.

3. Bina Lingkungan

Dalam menjalankan usaha, faktor lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Agar aktifitas usaha tidak merusak lingkungan melainkan malah lingkungan.

2. Kriteria untuk mendapatkan Dana PEM

- a. Calon adalah warga Kelurahan setempat dan berdomisili di Kelurahan tersebut yang dibuktikan dengan KTP dan KK
- b. Calon mengajukan proposal dan disertai dengan daftar asset usaha yang sudah ada dengan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,-. (Lampiran X)
- c. Calon tidak sedang menerima bantuan pemberdayaan ekonomi serupa dengan pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD I/APBD II yang dibuktikan dengan Keterangan dari Lurah. (Lampiran XVI)
- d. Calon tidak pernah tersangkut dengan masalah dana PER sebelumnya.
- e. Proposal dilengkapi fotocopy jaminan jika dana yang dimohon diatas Rp. 10.000.000,- dengan jaminan yang setara dengan dana yang diperoleh. (Lampiran VIII)
- f. Calon Penerima Dana PEM, minimal telah berusaha 3 (tiga) tahun dalam wilayah Kota Kupang.
- g. Melampirkan fotocopy ijin usaha bagi yang telah memiliki ijin usaha, terutama bagi usaha di bidang peternakan dan Bidang Industri.

3. Kelengkapan Administrasi

Dalam Pengajuan bantuan, kelengkapan administrasi yang perlu dilengkapi adalah:

- a. Surat permohonan dari calon penerima dana PEM yang dilengkapi dengan identitas pribadi. (Lampiran IX)
- b. Surat Keterangan Keabsahan Usaha dan Lurah bagi yang belum memiliki ijin usaha tentang lokasi usaha dan jenis usaha yang sedang dijalankan oleh pemohon dana PEM. (Lampiran XI)
- c. Setelah penetapan SK LPM tentang Penerima Dana PEM, LPM dan penerima Dana PEM membuat surat perjanjian tentang tata cara pengembalian Dana PEM. (Lampiran VII)
- d. Setelah penetapan SK LPM tentang Penerima Dana PEM, penerima Dana PEM membuat surat pernyataan kesediaan mengembalikan Dana PEM oleh penerima Dana PEM secara berkala sampai lunas. (Lampiran XII)

4. Tahapan dan Mekanisme untuk Mendapatkan Dana PEM.

a. Tahap Pengajuan Proposal

kompleks dari proses ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

kompleksitas yang ada dalam sistem ini adalah kompleksitas yang ada dalam
sistem ini

-
-
4. Berdasarkan surat keputusan LPM tentang Penerima Dana PEM dan NPHD, LPM mengajukan pencairan Dana PEM kepada Walikota Kupang Cq. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Kupang, selanjutnya Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mengajukan SPMU kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Kupang yang diterbitkan SP2D dan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Mentransfer uang ke Rekening LPM.
 5. Sebelum mencairkan dana kepada penerima Dana PEM, LPM membuat kesepakatan bersama antara LPM dengan Penerima Dana PEM tentang besaran dana yang akan dikembalikan setiap bulan (Lampiran VII)
 6. LPM segera mendistribusikan dana kepada Penerima Dana PEM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dana masuk di Rekening LPM sesuai dengan besaran dana yang terdapat dalam SK Penetapan LPM.
 7. Penyaluran Dana PEM diatas Rp. 5.000.000,- disetor ke rekening penerima, sedangkan dibawah Rp. 5.000.000,- diserahkan secara tunai.
 8. Pencairan Dana PEM di Bank hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan pengajuan dan penetapan Penerima Dana PEM.

e. Mekanisme Pengembalian dan Penyaluran Kembali Dana PEM

1. Periodeasasi pemanfaatan Dana PEM maksimal 12 Bulan.
2. Pengembalian Dana PEM dengan cara mencicil setelah tiga bulan dana diterima.
3. Penerima Dana PEM mengembalikan dana pokok secara berkala kepada LPM.
4. Dana yang dikembalikan oleh penerima Dana PEM, dimasukan ke Rekening LPM dan bukti setoran diserahkan kepada LPM melalui Pengelola Dana PEM.
5. Dana yang telah dikembalikan ke Rekening LPM digulirkan kembali kepada masyarakat sesuai proposal atau surat permohonan yang diajukan masyarakat setelah melalui tahapan verifikasi dan reverifikasi.
6. Pengguliran di laksanakan apabila pengembalian cicilan pada kas LPM telah mencapai minimal 25% dari Pagu Dana PEM untuk kelurahan bersangkutan.
7. Bunga Bank dari dana PEM digunakan sebagai tambahan modal untuk digulirkan kepada masyarakat.

f. Tugas LPM

Tugas LPM dalam mengelola Dana PEM adalah sebagai berikut:

-
-
1. *Menerima proposal dari masyarakat.*
 2. Meneliti dan melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap proposal masyarakat.
 3. Hasil verifikasi diserahkan kepada Tim Teknis dan Tim Ahli untuk dilakukan verifikasi.
 4. Berdasarkan hasil verifikasi dan reverifikasi proposal, LPM, Pengelola Dana PEM dan RT/RW menetapkan penerima Dana PEM.
 5. Mengajukan Permohonan Pencairan Dana PEM kepada Walikota Kupang cq. Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kota Kupang.
 6. Menerima Dana PEM dari Pemerintah Kota Kupang dan disetor ke Rekening LPM Kelurahan.
 7. Ketua LPM mencairkan dan menyalurkan Dana PEM kepada penerima.
 8. LPM mengelola Dana PEM wajib membuat pembukuan.
 9. Ketua LPM menerima kembali Dana PEM dari masyarakat melalui Rekening LPM dan digulirkan kepada Masyarakat.
 10. LPM mendampingi Tim Teknis dan Tim Ahli melakukan monitoring dan evaluasi.
 11. LPM mengusulkan Pengelola Administrasi Dana PEM kepada Walikota Kupang melalui BPM Kota Kupang.
 12. Melakukan pengawasan terhadap pengelola Administrasi Dana PEM.
 13. LPM menyampaikan kepada Walikota tanggal 10 setiap bulan dengan tembusan Kepada Ketua DPRD Kota Kupang dan Camat. (Lampiran XX & XXII)
 14. LPM mengummumkan kepada masyarakat di setiap Kelurahan masing-masing tentang pengelolaan Dana PEM. (Lampiran XXIII)
 15. LPM bertanggung jawab penuh terhadap tugas Pengelolaan Dana PEM.
 16. LPM mengumumkan kepada masyarakat tentang daftar nama dan besaran dana calon Penerima Dana PEM periode berikutnya. (Lampiran XXIV)

2.1.4. Pengorganisasian

1. Tingkat Kota

Agar pengelolaan dana PEM dapat optimal, maka perlu dibentuk Tim Teknis dan Tim Ahli di tingkat Kota Kupang sebagai berikut:

a. Tim Teknis

1) Tim Teknis terdiri dari:

- a. Kepala BPM Kota Kupang sebagai Ketua;
- b. Sekretaris pada BPM Kota Kupang sebagai Wakil Ketua;
- c. Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Ekonomi Lemah pada BPM Kota Kupang sebagai Sekretaris;
- d. Para Kepala Bidang pada BPM Kota Kupang sebagai Anggota;
- e. Kasubid Peningkatan Usaha Ekonomi dan Bantuan Modal dan Staf sebagai Anggota;
- f. Kasubid Kerjasama dan Penyaluran Hasil Usaha dan Staf sebagai Anggota;
- g. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada BPM Kota Kupang sebagai Anggota;
- h. Masing-masing 1 (satu) orang dari SKPD Teknis terkait sebagai anggota;
- i. Lurah se Kota Kupang sebagai Anggota.

2) Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang

3) Tugas Tim Teknis

- a. Melakukan reverifikasi pada calon penerima Dana PEM;
- b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi.

c. Tim Ahli

1) Untuk mendukung keberhasilan program PEM, maka dibentuk Tim Ahli dengan keahlian sebagai berikut:

- a. Keahlian di bidang kewirausahaan;
- b. Keahlian di bidang akuntansi;
- c. Keahlian di bidang manajemen;
- d. Keahlian di bidang sumberdaya manusia

2) Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang

3) Tugas Tim Ahli:

- a. Bersama Tim Teknis melakukan reverifikasi terhadap calon penerima Dana PEM;
- b. Melakukan analisis dan diagnosis dampak pelatihan terhadap kinerja usaha penerima Dana PEM;

- c. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap penerima dana PEM;
- d. Melakukan analisis dan diagnosis dampak pembinaan usaha penerima Dana PEM;
- e. Memonitor secara berkala penggunaan dan pemanfaatan Dana PEM;
- f. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap usaha, keuangan dan akuntansi dari setiap penerima Dana PEM;
- g. Menyampaikan hasil evaluasi komprehensif pelaksanaan Program Dana PEM kepada Walikota Kupang;
- h. Menyampaikan rekomendasi kepada LPM, dan Tim Teknis untuk memberikan perlakuan tertentu kepada penerima Dana PEM sesuai hasil monitoring dan evaluasi;
- i. Menyampaikan saran dan pendapat kepada LPM dan Tim Teknis menyangkut hasil pembinaan terhadap penerima Dana PEM;
- j. Menyediakan basis data/informasi bagi pengelola Dana PEM selanjutnya;
- k. Menjembatani kerjasama dengan pihak luar dalam rangka pengembangan usaha berdasarkan kinerja usaha penerima Dana PEM.

2. Tingkat Kelurahan

Agar terwujudnya optimalisasi penyaluran dana PEM tepat waktu, tepat sasaran, tepat pemanfaatan dan tepat administrasi, dibentuk Tim Pengelola Dana PEM, yang terdiri dari Ketua adalah Ketua LPM, Bendahara LPM dan Tenaga Administrasi adalah warga kelurahan setempat yang memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai tugas sebagai berikut (Lampiran VI)

a. Ketua

- 1) Menyelesaikan tugas-tugas administrasi pengelola Dana PEM;
- 2) Meneliti dan melakukan verifikasi berkas administrasi dan faktual;
- 3) Melancarkan proses administrasi pengelolaan Dana PEM;
- 4) Mengawasi jalannya usaha masyarakat;
- 5) Melaporkan hasil binaan, kemajuan dan kegagalan usaha masyarakat kepada LPM;
- 6) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Dana PEM setiap bulan kepada pengurus LPM

7) Menampingi Tim Teknis dan Tim Ahli dalam melakukan reverifikasi dan monitoring.

b. Bendahara

- 1) Menerima, membayar, membukukan dan menyetorkan dana PEM atas perintah Ketua Pengelola;
- 2) Membuat Laporan Keuangan Dana PEM setiap bulan;
- 3) Membantu melakukan verifikasi berkas administrasi dan faktual;
- 4) Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana PEM atas perintah Ketua.

c. Tenaga Administrasi

- 1) Menyelesaikan tugas-tugas administrasi pengelolaan Dana PEM;
- 2) Membantu melakukan verifikasi berkas administrasi dan faktual;
- 3) Melancarkan proses administrasi pengelolaan Dana PEM;
- 4) Mengawasi jalannya usaha masyarakat;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Dana PEM.

d. Syarat-syarat menjadi tenaga administrasi PEM:

- 1) Warga kelurahan setempat;
- 2) Berpendidikan minimal SMU/SMK/ sederajat;
- 3) Bersedia bekerja secara penuh melayani masyarakat yang dibuktikan dengan surat pernyataan (Lampiran XVIII);
- 4) Memahami mekanisme penyaluran dan pemanfaatan Dana PEM;
- 5) Usia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun.

e. Pengelola Dana PEM dibentuk dengan Keputusan Walikota Kupang

f. Pengelolaa Dana PEM dilaksanakan di Kantor Kelurahan.

2.1.5. Hak dan Kewajiban Pengelola Dana PEM

1. Hak

Berhak mendapatkan insentif dan perlindungan dari Pemerintah Kora Kupang;

2. Kewajiban

- a. Wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
- b. Wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengurus LPM setiap akhir bulan.

2.1.6. Pembinaan dan Pengendalian

1. Walikota dan Wakil Walikota

- a. Melakukan pembinaan agar program PEM dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
- b. Mengendalikan pelaksanaan program pemberian Dana PEM

2. Camat

- a. Memberikan pembinaan kepada masyarakat penerima Dana PEM agar mengembalikan dana PEM secara teratur;
- b. Memberikan pembinaan agar masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan dana PEM dan tujuan penggunaannya;
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat.

3. Lurah

- a. Memberikan pembinaan kepada masyarakat penerima Dana PEM agar mengembalikan dana PEM secara teratur;
- b. Mengendalikan secara teknis pengelolaan kegiatan usaha masyarakat yang menggunakan Dana PEM.

2.1.7. Fasilitator Kelurahan

Fasilitator BPM Kota Kupang yang ditempatkan di tiap Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

- a. Memfasilitasi proses identifikasi usaha ekonomi produktif masyarakat;
- b. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktifnya;
- c. Membantu menata administrasi dan pelaporan perkembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat;

-
-
- d. Membantu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap proposal masyarakat;
 - e. Melakukan dokumentasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk metode dan pendekatan yang digunakan;
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya, fasilitator bertanggungjawab kepada Kepala BPM Kota Kupang;
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala BPM Kota Kupang setiap bulan, paling lambat tanggal 5;
 - h. Menampingi Tim Teknis dan Tim Ahli dalam melaksanakan reverifikasi dan monitoring;
 - i. Bekerja sehari-sehari di Kelurahan, dan hasil pekerjaan dilaporkan kepada Lurah.

2. Fungsi

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan pengelola Dana PEM di kelurahan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penerima Dana PEM.

2.1.8. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis dan Tim Ahli dan dilaksanakan secara berkala dengan cara:

1. Kunjungan langsung ke tempat usaha masyarakat;
2. Pertemuan rutin dengan Pengurus LPM dan Pengelola Administrasi Dana PEM di tingkat kelurahan;
3. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota dalam bentuk laporan yang dibuat secara berkala dengan tembusan kepada DPRD Kota Kupang (Lampiran XIII)

2.1.9. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana PEM Kota Kupang, dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana PEM.
2. Pengawasan dilakukan oleh:
 - a. DPRD Kota Kupang
 - b. Aparat Pengawasan Fungsional

c. Tim Teknis

d. Camat

e. Lurah

f. RT dan RW

g. Masyarakat

2.2. Realisasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Realisasi Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kota Kupang dilakukan pada tahun 2013 dan 2015, masing-masing sebesar Rp. 14.697.000.000 dan Rp. 10.500.000.000.- Realisasi tahun 2015 sedang berjalan, karena itu kajian ini memfokuskan pada realisasi dan perguliran dana PEM tahun 2013. Hasilnya diringkas dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Realisasi dan Perguliran Dana PEM di Kota Kupang Tahun 2013

Keterangan	Jumlah Dana yang Disalurkan (Rp)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penerima	Pengembalian (Rp)	
				Lunas	Sedang Mencicil
Tahun 2013	14.697.000.000	51	3.888	12.937.775.615	1.684.484.385
				88,03%	11,46%
Perguliran I	5.678.000.000		1.236	990.991.933	4.687.008.067
				17,45%	82,55%
Perguliran II	3.320.800.000		465	17.614.600	3.303.185.400
				0,53%	99,47%
Perguliran III	313.000.000		58	7.418.000	305.582.000
				2,37%	97,63%

Sumber: BPM Kota Kupang, 2015 (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disampaikan beberapa catatan penting terkait realisasi Dana PEM Tahun 2013 sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana awal sebesar Rp. 14.697.000.000 untuk 3.888 penerima pada 51 kelurahan, telah menciptakan pelipatgandaan melalui perguliran tahap I – III, sehingga jumlah pinjaman yang disalurkan meningkat menjadi Rp. 24.008.800.000 atau bertambah sebesar Rp. 9.311.800.000 (63,36%); sementara itu, jumlah penerima juga meningkat menjadi 5.647 atau bertambah sebanyak 1.759 penerima (45,24%).
- 2) Tingkat pengembalian pada tahap awal cukup baik, yaitu 88,03%, tetapi pada perguliran I, II dan III menunjukkan gejala penurunan. Secara keseluruhan, tingkat pengembalian

penyaluran awal dan perguliran (I – III) sebesar 61,12%. Gejala penurunan ini dapat terjadi, mungkin disebabkan perguliran I, II dan III belum memasuki saat jatuh tempo, sehingga para penerima pinjaman sedang dalam proses pengembalian.

BAB III

DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA DAN PENDAPATAN PENERIMA BANTUAN

3.1. Gambaran Umum Sampel Penerima Bantuan

a) Rencana dan Realisasi Sampel

Jumlah penerima bantuan permodalan dalam tahun 2013 di Kota Kupang melalui penyaluran awal sebanyak 3.888 orang. Sampel direncanakan 10% atau sebanyak 388 orang. Sampel yang berhasil diwawancarai dan dapat dianalisis datanya sebanyak 306 orang (78,86%).

b) Usia dan Tingkat Pendidikan Responden Penerima Bantuan

Pada umumnya responden penerima bantuan pemberdayaan ekonomi berada pada usia produktif, dengan proporsi terbesar berada pada rentang usia 39 – 45 tahun. Demikian juga dari segi tingkat pendidikan cukup memadai, dimana sebagian besar responden berpendidikan SMA atau sederajat. Postur usia dan tingkat pendidikan responden seperti ini cukup baik, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial untuk pengembangan usaha diwaktu mendatang.

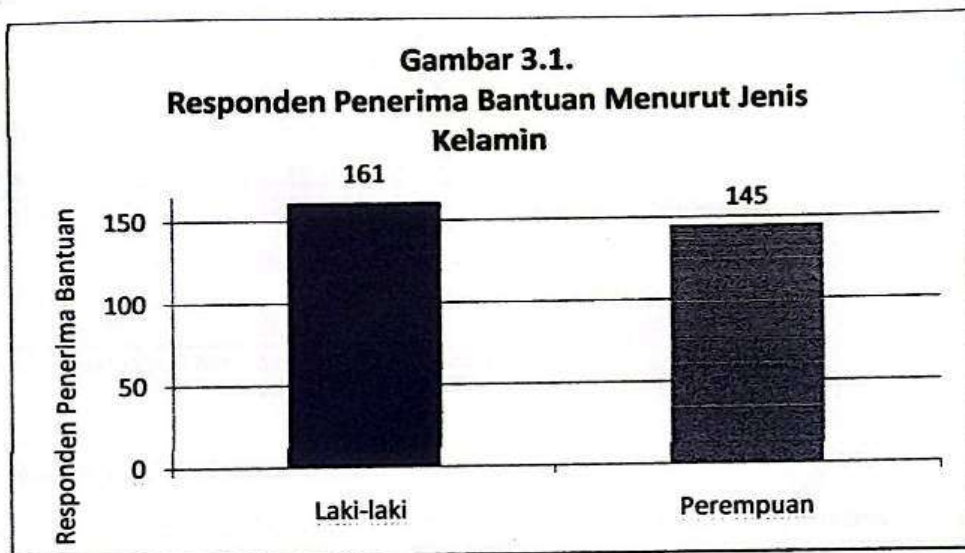
Tabel 3.1.
Usia dan Tingkat Pendidikan Responden

<i>Interval Usia</i>	<i>Responden</i>	<i>Pendidikan</i>	<i>Responden</i>
18 - 24	2	Tdk ada Data	26
25 - 31	24	SD-Sederajat	40
32 - 38	50	SMP-Sederajat	67
39 - 45	102	SMA-Sederajat	147
46 - 52	55	Diploma	19
53 - 59	43	Sarjana	7
> 60	30	Jumlah=	306
Jumlah=	306		

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

c) Jenis Kelamin

Dari segi jenis kelamin, responden penerima bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, namun demikian perbedaan tersebut relatif kecil.



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

d) Profil Usaha Responden

1. Jenis Usaha

Pada umumnya responden penerima bantuan pemberdayaan ekonomi memilih jenis usaha dagang dan jasa, baik sebelum mendapat bantuan maupun setelah mendapat bantuan. Namun demikian, dari segi jumlahnya, terjadi sedikit pergeseran jenis usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan. Pergeseran usaha terjadi pada usaha jasa, yaitu dari 26,14% menjadi 14,71%; sementara usaha dagang mengalami peningkatan dari 55,23% menjadi 62,09%. Jenis usaha lainnya mengalami pergeseran dengan persentase yang relatif kecil. Fakta ini menunjukkan bahwa preferensi pilihan usaha yang paling menonjol dikalangan responden adalah usaha dagang. Hal ini dapat dipahami dari segi alasan responden memilih jenis usaha, dimana sebagian besar responden memilih usaha dengan alasan mudah dikerjakan dan sesuai kemampuan/ketrampilan.

Tabel 3.2.
Jenis usaha Responden (Sebelumnya dan Saat Ini)

Distribusi Penerima bantuan Menurut Jenis Usaha Sebelumnya			Distribusi Penerima Bantuan Menurut Jenis Usaha Saat Ini		
Jenis Usaha	Responden	%	Jenis Usaha	Responden	%
Jasa	80	26,14	Jasa	45	14,71
Dagang	169	55,23	Dagang	190	62,09
Ternak	18	5,88	Ternak	20	6,54
Kerajinan	3	0,98	Kerajinan	4	1,31
Industri Makanan	26	8,50	Industri Makanan	32	10,46
Petani & Nelayan	5	1,63	Mebel	7	2,29
Bengkel	5	1,63	Bengkel	8	2,61
Jumlah	306	100,00	Jumlah	306	100,00

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

2. Jumlah Bantuan dan Lama Usaha

Menurut ketentuan, jumlah bantuan yang diterima responden berkisar antara Rp.1.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000. Data responden menunjukkan bahwa, dari segi jumlah bantuan, proporsi terbesar responden menerima bantuan < Rp. 5.000.000 dan antara Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000. dari segi lama berusaha, proporsi terbanyak responden telah berusaha antara 4 – 6 tahun. Dilihat dari kecenderungannya, responden dengan pengalaman berusaha yang lebih lama mendapat bantuan modal yang semakin besar. Hal ini dapat dipahami, dan bila dikaitkan dengan volume usaha responden, tampak terdapat kecenderungan, bahwa responden yang telah berusaha lama memiliki volume usaha yang relatif besar. Tampaknya jumlah bantuan yang diberikan kepada responden paralel dengan volume usaha dan lama berusaha.

Tabel 3.3.
Jumlah Bantuan Menurut Lama Usaha Responden

Jumlah Bantuan (Rp)	Lama Berusaha (Tahun)					Jumlah	Persentase
	1 - 3	4 - 6	7 - 9	10 - 12	> 12		
< 5.000.000	35	58	37	12	4	146	47,71
5.000.000 - 10.000.000	22	83	24	8	4	141	46,08
10.000.000 - 15.000.000	0	4	4	2	1	11	3,59
> 15.000.000	0	0	2	3	3	8	2,61
Jumlah	57	145	67	25	12	306	100,00
Persentase	18,63	47,39	21,90	8,17	3,92	100,00	==

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

3. Kinerja Pengembalian Bantuan (Pinjaman)

Pada umumnya tingkat pengembalian cukup baik. Responden yang telah melunasi kewajibannya sebanyak 62,09% dan sedang mencicil sebanyak 37,91%. Total bantuan yang disalurkan kepada seluruh responden sebesar Rp. 1.531.000.000, yang telah dikembalikan (lunas dan sedang mencicil) sebesar Rp. 1.017.760.016 atau 66,48%.

Tabel 3.4.
Kinerja Responden dalam Pengembalian Bantuan (Pinjaman)

Dicicil/ Kembalikan	Responden	%	Kinerja Pengembalian	Jumlah
Sedang Dicicil	116	37,91	Total Bantuan 306 Responden	1.531.000.000
Lunas	190	62,09	Pengembalian (Lunas & Cicilan)	1.017.760.016
Jumlah	306	100,00	Persentase	66,48

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

3.2. Pengelolaan Usaha

a) Gagasan Memulai Usaha dan Perencanaan Usaha

Sebagian besar responden mengaku bahwa usaha yang dijalankan saat ini dipilih berdasarkan inisiatif sendiri, dengan pertimbangan yang paling menonjol adalah mudah dikerjakan (33,01%), sesuai keahlian (36,60%) dan banyak pembeli (16,67%). Fakta ini menunjukkan bahwa, responden sadar atas pilihan jenis usahanya. Pilihan jenis usaha adalah jenis usaha yang mudah dikerjakan, disesuaikan dengan keahlian dan pertimbangan pasar.

Pertimbangan seperti ini memungkinkan responden dapat mengurus usahanya dengan baik, namun pertimbangan demikian juga memiliki kelemahan, yaitu responden hanya fokus pada usaha yang mudah atau bisa dikerjakan, sehingga sebagian besar responden memilih jenis usaha dagang. Jenis usaha lainnya dibidang pengolahan yang sebenarnya memberi nilai tambah yang lebih besar, justru kurang diminati responden. Hal ini tentu berkaitan dengan keahlian/ketrampilan yang dimiliki. Betapapun sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, namun latar belakang pendidikan mereka bersifat umum, sehingga tidak membekali mereka dengan ketrampilan teknis tertentu.

Rencana usaha pada umumnya dibuat sendiri, hanya sebagian kecil responden yang rencana usahanya dibantu orang lain. Pendapat responden bahwa rencana usaha disusun sendiri, sejatinya berkaitan dengan gagasan memulai usaha, di mana mereka memilih jenis usaha atas dasar inisiatif sendiri. Berkaitan dengan rencana usaha, pada tahap awal ketika hendak memulai usaha responden telah memikirkan beberapa aspek penting seperti jenis

usaha, tempat usaha, modal usaha dan bagaimana mengelola usaha, tetapi secara formal, penyusunan rencana atau proposal usaha responden mendapat bantuan supervisi dan pemberkasannya oleh Pengelola Dana PEM, Tim Teknis, Tim Ahli dan Fasilitator Kelurahan.

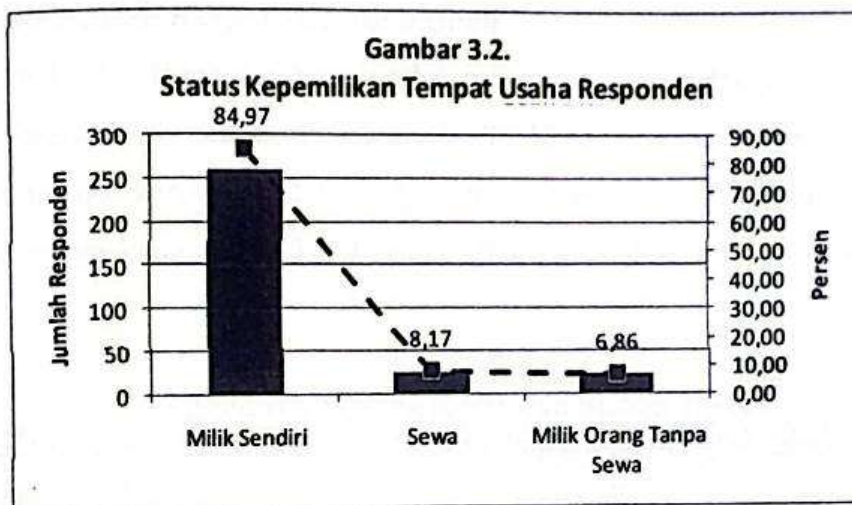
Tabel 3.5.
Gagasan Memulai Usaha dan Perencanaan Usaha

Gagasan Mulai Usaha	Jumlah	%	Alasan	Jumlah	%
Inisiatif Sendiri	303	99,02	Tidak ada Alasan	22	7,19
Dorongan Orang	3	0,98	Banyak Pembeli	51	16,67
Jumlah	306	100,00	Mudah Dikerjakan	101	33,01
Perencanaan	Jumlah	%	Sesuai keahlian	112	36,60
Tidak Ada Perencanaan	3	0,98	Bahan Baku Tersedia	9	2,94
Disusun Sendiri	297	97,06	Alasan Lain	11	3,59
Dibantu Orang lain	6	1,96	Jumlah	306	100,00
Jumlah	306	100,00			

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

b) Status Kepemilikan Tempat Usaha

Sebagian besar responden memiliki tempat usaha sendiri (84,97%), dan hanya sebagian kecil dengan status sewa (8,17%) dan menggunakan milik orang lain tanpa sewa (6,86%). Pada tahap awal, status tempat usaha milik sendiri dari responden cukup baik, karena responden tidak memerlukan biaya untuk sewa tempat usaha. Akan tetapi kelemahannya, lokasi tempat usaha bukanlah lokasi yang strategis secara ekonomis. Pada umumnya responden menggunakan tempat tinggal dan pekarangan milik sendiri sebagai lokasi tempat usaha. Pada tahap selanjutnya, pengelompokkan tempat usaha pada tempat tinggal atau pekarangan milik sendiri dapat menimbulkan masalah dari segi aspek lingkungan dan tataruang. Selain itu, untuk kepentingan pengembangan usaha, tampaknya sulit mengembangkan usaha pada tempat tinggal dan pekarangan milik sendiri, sehingga perlu dipikirkan lokasi tertentu, yang dari segi lingkungan, tataruang dan kepentingan ekonomi, cocok sebagai tempat usaha.



Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

c) Pelaksanaan Usaha

Pelaksanaan usaha dijelaskan melalui 5 (lima) indikator, yaitu: pelaksana usaha, penggunaan tenaga kerja, sistem upah, curahan waktu kerja dan cara penjualan. Data dari kelima indikator tersebut menunjukkan bahwa, pengelolaan usaha yang dilakukan responden belumlah optimal. Rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Pelaksana Usaha

Pada umumnya responden sebagai pelaksana tunggal dalam usahanya, dan tidak menggunakan bantuan orang lain dalam mengelola usahanya (77,45%); responden yang melaksanakan usaha dibantu orang lain sebanyak 22,55%. Alasan utama responden tidak menggunakan bantuan orang lain adalah kegiatan masih terbatas sehingga dapat diurus sendiri (79,32%) dan belum mampu memberi upah tenaga kerja (20,68%). Kondisi demikian menunjukkan bahwa skala usaha atau aktivitas usaha responden masih terbatas atau relatif kecil, sehingga segala sesuatu masih dapat dikerjakan sendiri.

Tabel 3.6.
Pelaksanaan Usaha Responden

Pelaksana	Jumlah	%	Alasan Kerjakan Sendiri	Jumlah	%
Dikerjakan Sendiri	237	77,45	Kegiatan Terbatas	188	79,32
Dibantu Orang Lain	69	22,55	Belum Mampu Menggaji TK	49	20,68
Jumlah=	306	100,00	Jumlah=	237	100,00

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

2. Penggunaan Tenaga Kerja dan Sistem Upah

Pada tabel 3.7 diketahui bahwa jumlah responden yang tidak menggunakan tenaga kerja dalam mengelola usahanya sebanyak 77,45%; sementara itu responden yang menggunakan tenaga kerja antara 1 – 2 orang sebanyak 18,95% dan responden yang menggunakan tenaga kerja antara 3 – 4 orang sebanyak 3,59% sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 3.7.
Penggunaan Tenaga Kerja dan Sistem Upah

Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah	%	Sistem Upah	Jumlah	%
Tidak ada TK	237	77,45	Tidak ada TK	237	77,45
1 - 2 Orang	58	18,95	Harian	22	7,19
3 - 4 Orang	11	3,60	Mingguan	16	5,23
Jumlah=	306	100,00	Bulanan	30	9,80
			Bagi Hasil	1	0,33
			Jumlah=	306	100,00

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

Dari 22,55% responden yang menggunakan tenaga kerja, sistem upah yang diterapkan pada umumnya terdiri dari upah harian, upah mingguan dan upah bulanan. Tercatat hanya 1 (satu) responden yang menggunakan sistem bagi hasil. Terlepas dari jumlah tenaga kerja yang digunakan, penerapan sistem upah sebagaimana disebutkan, menunjukkan bahwa, responden sebagai pemilik usaha telah menciptakan suatu sistem balas jasa yang memberi kepastian bagi pekerja. Hal ini merupakan indikasi yang baik, terutama dari sisi pengelolaan usaha secara profesional.

3. Curahan Waktu Kerja dan Cara Penjualan

Curahan waktu kerja responden bervariasi, 41,83% bekerja antara 1 – 6 jam per hari; dan 44,44% bekerja antara 7 – 12 jam per hari. Terdapat sebagian kecil responden yang bekerja cukup maksimal, yaitu antara 13 – 18 jam per hari (12,09%). Data ini menunjukkan bahwa, masih terdapat proporsi responden yang cukup besar, yang belum bekerja optimal. Mereka hanya bekerja kurang dari 6 (enam) jam per hari; berarti masih terdapat waktu luang yang relatif besar. Pada umumnya responden pada kategori ini beralasan bahwa, kegiatan usaha mereka masih terbatas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya membutuhkan waktu yang relatif pendek, dan pada waktu-waktu tertentu, karena hari libur dan urusan keluarga, kegiatan usaha mereka ditutup. Hal ini secara keseluruhan menggambarkan etos kerja yang belum memadai.

Walaupun demikian, terdapat juga proporsi responden yang telah menggunakan waktu kerja secara optimal. Responden kategori ini bekerja antara 7 – 12 jam dan bahkan antara 13 – 18 jam per hari. Perbedaan curahan waktu kerja tersebut paralel skala usaha. Pada responden dengan jumlah modal < Rp. 5.000.000 curahan waktu kerja relatif pendek per hari, sementara pada responden dengan jumlah modal > Rp. 5.000.000, curahan waktu kerja relatif lebih lama.

Tabel 3.8.
Curahan Waktu Kerja dan Cara Penjualan

Waktu Kerja per Hari	Jumlah	%	Cara Penjualan	Jumlah	%
1-6 Jam	128	41,83	Tunai	237	77,45
7-12 Jam	136	44,44	Kredit	9	2,94
13-18 Jam	37	12,09	Tunai + Kredit	60	19,61
> 18 jam	5	1,63	Jumlah	306	100,00
Jumlah	306	100,00			

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

Cara penjualan pada umumnya dilakukan secara tunai. Hal ini tentu terkait dengan usaha responden yang sebagian besar berdagang, dengan skala usaha atau jumlah modal < Rp.5.000.000.- Pilihan cara penjualan tunai bagi mereka dapat dipahami, mengingat jumlah modal dan persediaan yang terbatas, sehingga penjualan dengan cara kredit dapat menghambat kelangsungan usaha mereka. Pada responden yang menerapkan cara penjualan tunai dan kredit, jumlah modal dan persediaan relatif besar, sehingga tidak menghadapi kesulitan dalam menerapkan cara penjualan tunai dan kredit sekaligus; bahkan dengan penjualan kredit, omzet penjualannya menjadi relatif besar. Penerapan cara penjualan tunai dan kredit secara bersamaan, sejatinya dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan usaha. Responden yang mampu menerapkan cara penjualan tunai dan kredit cenderung memiliki usaha dengan skala dan omzet penjualan yang lebih besar; hal ini akan berdampak pada pendapatan yang lebih besar pula.

d) Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan keuangan dijelaskan melalui 4 (empat) indikator, yaitu pencatatan atas transaksi, penyimpanan pemasukan setiap hari, perhitungan keuntungan dan pemisahan pengeluaran. Data keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa, faktor penatausahaan keuangan belum dilakukan secara baik oleh responden. Rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Transaksi dan Penyimpanan Pemasukan

Pencatatan transaksi usaha belum dilakukan secara tertib oleh responden. Pada umumnya (66,34%) responden tidak mencatat atau hanya kadang-kadang saja mencatat transaksi yang tercatat setiap hari. Hanya 32,03% responden yang melakukan pencatatan transaksi secara teratur. Pemasukan dari transaksi setiap hari pada umumnya dipegang sendiri (71,24%); hanya sebagian kecil responden (25,16%) yang menyimpan pemasukan di Bank/Koperasi.

Ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi menunjukkan bahwa, aspek pengendalian usaha belum dilakukan dengan baik. Hal ini terutama terdapat pada responden dengan jumlah modal < Rp. 5.000.000, di mana volume transaksi yang terjadi relatif kecil, sehingga dalam mengendalikan usaha, responden lebih mengandalkan faktor ingatan dibanding pencatatan.

Hal ini juga tampak pada penyimpanan pemasukan dari transaksi setiap hari. Sebagian besar responden (71,24%) menyimpan sendiri pemasukan setiap hari; hanya 25,16% responden yang menyimpan di bank/koperasi. Gejala ini menunjukkan bahwa, cara responden mengamankan asetnya masih bersifat tradisional, dan sangat rawan dari segi keamanan.

Tabel 3.9.

Pencatatan Transaksi dan Penyimpanan Pemasukan

Pencatatan Transaksi	Jumlah	%	Penyimpanan Pemasukan	Jumlah	%
Tdk ada Keterangan	5	1,63	Pegang Sendiri	218	71,24
Tidak Dicatat	111	36,27	Bank/Koperasi	77	25,16
Kadang-kadang	92	30,07	Lain-lain	11	3,59
Dicatat	98	32,03	Jumlah=	306	100,00
Jumlah=	306	100,00			

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

2. Perhitungan Keuntungan dan Pemisahan Pengeluaran

Keteraturan responden dalam melakukan perhitungan atas transaksi (uang masuk dan Keluar) setiap hari belum memadai. Hanya 26,47% responden yang secara teratur melakukan perhitungan atas keuntungan yang diperoleh; sebagian besar 73,53% responden belum melakukan perhitungan keuntungan secara teratur. Ketidakteraturan ini menyebabkan responden tidak mengetahui secara tepat; seberapa besar keuntungan atau kerugian yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan usaha yang dibuat responden hanya didasarkan pada berapa banyak uang tunai yang tersedia, bukan hasil perhitungan rugi/laba. Keputusan usaha yang dibuat dengan cara seperti ini masih dimungkinkan untuk skala usaha yang relatif kecil.

Namun untuk kepentingan pengembangan usaha atau bagi responden dengan skala usaha yang relatif besar, pembuatan keputusan usaha dengan cara seperti ini mengandung resiko kesalahan yang relatif besar.

Tabel 3.10.
Perhitungan Keuntungan dan Pemisahan Pengeluaran

Perhitungan Keuntungan	Jumlah	%	Pemisahan Pengeluaran	Jumlah	%
Selalu dihitung	81	26,47	Selalu dipisahkan	76	24,84
Kadang-kadang	101	33,01	Kadang-kadang	106	34,64
Tidak	124	40,52	Tidak	124	40,52
Jumlah=	306	100,00	Jumlah=	306	100,00

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

Paralel dengan perhitungan keuntungan, dalam hal pemisahan pengeluaran, khususnya pengeluaran pribadi dan usaha, belum dipisahkan dengan baik oleh responden. Hanya 24,84% responden yang membuat pemisahan jelas antara pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan usaha. Sebagian besar responden (75,16%) tidak melakukan pemisahan atau kadang-kadang saja melakukan pemisahan.

Data di atas sejalan dengan fakta yang telah dikemukakan, bahwa sebagian besar responden memegang sendiri pemasukannya. Dalam kondisi demikian, responden akan mengalami kesulitan untuk membedakan pengeluarannya. Akibatnya, pengeluaran menjadi tidak terkendali dengan baik. Namun demikian, terdapat juga sebagian kecil responden (24,84%) yang mampu melakukan pemisahan dengan baik pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan pengeluaran untuk kepentingan usaha. Fenomena ini menunjukkan bahwa, hanya sebagian kecil responden yang dapat bersikap profesional terhadap pengelolaan keuangannya.

3.3. Perkembangan Skala Usaha

Perkembangan skala usaha responden dijelaskan melalui 3 (tiga) indikator, yaitu perkembangan modal usaha, persediaan usaha dan piutang usaha. Hasil analisis data ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa, skala usaha responden cenderung mengalami peningkatan. Rinciannya adalah sebagai berikut.

a) Perkembangan Modal Usaha

Setelah mendapat bantuan dan memanfaatkannya lebih kurang 2 (dua) tahun, modal usaha responden memperlihatkan perubahan yang cukup baik. Pada awal usaha, proporsi responden dengan modal usaha kurang dari Rp. 5.000.000 sangat dominan, yaitu sebanyak 66,99%; namun pada saat ini sebanyak 34,31% atau berkurang sebanyak 32,68%; sementara responden dengan kategori modal usaha antara Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 mengalami kenaikan dari 18,95% (saat memulai usaha) menjadi 24,18% (saat ini).

Pada kategori modal usaha yang lebih besar, juga terlihat perubahan yang cukup baik. Responden dengan modal usaha antara Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000 dan antara Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000, masing-masing meningkat dari 4,58% menjadi 16,99% dan 3,59% menjadi 14,05%. Sementara responden dengan jumlah modal usaha di atas Rp.20.000.000 meningkat dari 5,88% menjadi 10,46%.

Tabel 3.11.
Perkembangan Modal Usaha Responden

Kategori	Jumlah Modal Usaha Awal		Jumlah Modal Usaha Saat Ini		Perubahan (%)
	Jumlah	%	Jumlah	%	
< 5.000.000	205	66,99	105	34,31	-32,68
5.000.000 - 10.000.000	58	18,95	74	24,18	5,23
10.000.000 - 15.000.000	14	4,58	52	16,99	12,42
15.000.000 - 20.000.000	11	3,59	43	14,05	10,46
≥ 20.000.000	18	5,88	32	10,46	4,58
Jumlah	306	100,00	306	100,00	=

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa, jumlah responden dengan modal usaha yang relatif kecil yaitu kurang dari Rp. 5.000.000 semakin berkurang; sementara responden dengan modal usaha yang lebih besar mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, rata-rata modal usaha responden awal usaha sebesar Rp. 5.646.191; meningkat menjadi Rp. 12.088.933. Gejala ini menunjukkan hasil nyata yang cukup baik dari implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan proses akumulasi kapital pada responden.

b) *Perkembangan Persediaan Usaha*

Persediaan usaha adalah bagian dari modal usaha. Peningkatan persediaan mengindikasikan peningkatan dalam skala usaha. Pada awal memulai usaha, jumlah persediaan usaha responden pada kategori kurang dari Rp. 5.000.000 sebanyak 64,71%; pada saat ini sebanyak 46,73%; atau mengalami penurunan sebanyak 17,97%. Pada kategori persediaan Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000, meningkat dari 18,30% menjadi 22,88% dan pada kategori yang lebih besar yaitu Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000 meningkat dari 10,46% menjadi 18,95%. Secara keseluruhan, rata-rata persediaan usaha pada awal usaha sebesar Rp. 3.563.153, saat ini meningkat menjadi Rp. 9.498.614 Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan persediaan usaha responden setelah mendapat bantuan yang telah dikelola lebih kurang 2 (dua) tahun.

Tabel 3.12.
Perkembangan Jumlah Persediaan Usaha Responden

Kategori	Persediaan Awal		Persediaan Saat Ini		Perubahan (%)
	Jumlah	%	Jumlah	%	
< 5.000.000	198	64,71	143	46,73	-17,97
5.000.000 - 10.000.000	56	18,30	70	22,88	4,58
10.000.000 - 15.000.000	32	10,46	58	18,95	8,50
15.000.000 - 20.000.000	12	3,92	20	6,54	2,61
≥ 20.000.000	8	2,61	15	4,90	2,29
Jumlah	306	100,00	306	100,00	=

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

c) *Perkembangan Piutang Usaha*

Piutang usaha terjadi karena penggunaan sistem penjualan kredit. Adanya piutang menerangkan tentang volume usaha; semakin besar piutang, volume usaha cenderung membesar. Dari 306 responden, hanya 69 responden yang menerapkan sistem penjualan dengan kredit serta kombinasi tunai dan kredit. Pada saat memulai usaha, 50,72% responden memiliki piutang usaha kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 50,72%, kemudian menurun menjadi 40,58%. Pada kategori piutang antara Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 juga berkurang dari 39,13% menjadi 24,64%; namun pada kategori piutang usaha yang lebih besar yaitu Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000, jumlah responden meningkat dari 4,35% menjadi 20,29% atau

naik sebesar 15,94%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah piutang usaha responden meningkat, mengindikasikan adanya peningkatan volume usaha.

Tabel 3.13.
Perkembangan Jumlah Piutang Usaha Responden

Kategori	Piutang Awal Usaha		Piutang Saat Ini		Perubahan (%)
	Jumlah	%	Jumlah	%	
< 1.000.000	35	50,72	28	40,58	-10,14
1.000.000 - 5.000.000	27	39,13	17	24,64	-14,49
5.000.000 - 10.000.000	3	4,35	14	20,29	15,94
10.000.000 - 15.000.000	1	1,45	6	8,70	7,25
15.000.000 - 20.000.000	3	4,35	4	5,80	1,45
≥ 20.000.000	0	0,00	0	0,00	0,00
Jumlah	69	100,00	69	100,00	=

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

3.4. Pendapatan Responden Penerima Bantuan

a) Omzet Penjualan, Biaya Produksi dan Penerimaan Bersih

Omzet penjualan per bulan responden menunjukkan gejala peningkatan yang cukup baik. Pada saat memulai usaha, omzet penjualan responden yang kurang dari Rp. 5.000.000 per bulan sebanyak 48,69%; kemudian saat ini menjadi 39,54%, atau berkurang sebanyak 9,15%. Pada kategori omzet penjualan Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 per bulan, jumlah responden meningkat dari 32,35% menjadi 36,60% atau naik 4,25%. Pada kategori omzet penjualan yang lebih tinggi, yaitu Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000 meningkat dari 9,15% menjadi 11,44% atau naik 2,29%, demikian juga gejala peningkatan omzet penjualan terjadi pada kategori yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, rata-rata omzet penjualan responden mengalami peningkatan dari Rp.39.796.875 (saat mulai usaha) menjadi Rp. 61.308.511 (saat ini); yang berarti skala usaha juga mengalami peningkatan setelah mendapat bantuan modal yang telah dikelola lebih kurang 2 tahun.

Tabel 3.14.
Perkembangan Omzet Penjualan Responden

Kategori	Omzet Penjualan per Bulan Awal Usaha		Omzet Penjualan per Bulan Saat Ini		Perubahan (%)
	Jumlah	%	Jumlah	%	
< 5.000.000	149	48,69	121	39,54	-9,15
5.000.000 - 10.000.000	99	32,35	112	36,60	4,25
10.000.000 - 15.000.000	28	9,15	35	11,44	2,29
15.000.000 - 20.000.000	21	6,86	24	7,84	0,98
20.000.000 - 25.000.000	6	1,96	9	2,94	0,98
≥ 25.000.000	3	0,98	5	1,63	0,65
Jumlah	306	100,00	306	100,00	=

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

Sejalan dengan peningkatan omzet penjualan, biaya produksi juga mengalami kenaikan, namun dengan jumlah yang relatif lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan yang cukup. Secara keseluruhan, rata-rata omzet penjualan responden per bulan sebesar Rp. 15.361.928 dan biaya produksi rata-rata sebesar Rp. 7.611.438, menghasilkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 7.751.961 per bulan. Hal ini menggambarkan adanya pengaruh yang cukup signifikan dari bantuan permodalan yang diterima terhadap perkembangan kinerja usaha responden.

Tabel 3.15.
Gambaran Omzet Penjualan, Biaya Produksi dan Penerimaan Bersih Responden

Kategori	Omzet Penjualan per Bulan Saat Ini		Biaya Propduksi per Bulan		Penerimaan Bersih per Bulan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 5.000.000	71	23,20	157	51,31	156	50,98
5.000.000 - 10.000.000	86	28,10	58	18,95	61	19,93
10.000.000 - 15.000.000	11	3,59	40	13,07	49	16,01
15.000.000 - 20.000.000	45	14,71	24	7,84	17	5,56
20.000.000 - 25.000.000	43	14,05	27	8,82	20	6,54
≥ 25.000.000	50	16,34	0	0,00	3	0,98
Jumlah	306	100,00	306	100,00	306	100,00
Rata-rata (Rp)	15.361.928	--	7.611.438	--	7.751.961	--

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

b) Penggunaan Penerimaan Bersih Usaha

Rata-rata penerimaan bersih usaha seluruh responden sebesar Rp. 7.751.961 per bulan. Penerimaan bersih atau keuntungan tersebut, rata-rata Rp. 2.648.039 (34,16%) per

bulan digunakan untuk menambah modal, dan rata-rata Rp. 5.103.922 (65,84%) digunakan untuk menambah pendapatan keluarga dan digunakan untuk konsumsi. Dilihat dari proporsinya, jumlah penerimaan bersih usaha yang digunakan menambah modal relatif lebih kecil dibanding untuk kepentingan konsumsi. Namun demikian, gambaran ini menunjukkan adanya pengaruh nyata (signifikan) dari pemberian bantuan permodalan terhadap pendapatan responden.

Tabel 3.16.
Gambaran Proporsi Penggunaan Penerimaan Bersih Usaha Responden

Kategori	Penggunaan Pendapatan untuk Menambah Modal		Penggunaan Pendapatan untuk pribadi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
< 3.000.000	177	57,84	156	50,98
3.000.000 - 6.000.000	35	11,44	88	28,76
6.000.000 - 9.000.000	52	16,99	25	8,17
9.000.000 - 12.000.000	23	7,52	22	7,19
12.000.000 - 15.000.000	19	6,21	14	4,58
≥ 15.000.000		0,00	1	0,33
Jumlah	306	100,00	306	100,00
Rata-rata (Rp)	2.648.039	34,16	5.103.922	65,84

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Lapangan (Data diolah)

3.5. Elaborasi Hasil Analisis Data

a) Pilihan Jenis Usaha

Tiga jenis usaha yang paling menonjol dipilih responden penerima bantuan adalah usaha perdagangan (62,09%); usaha jasa (14,71%) dan usaha industri makanan (10,46%). Dibanding dengan jenis usaha responden sebelum menerima bantuan sebenarnya tidak berbeda; perbedaan hanya terdapat pada persentasenya, di mana responden yang berusaha dagang sebelumnya sebanyak 55,23%, setelah mendapat bantuan meningkat menjadi 62,09%; kemudian responden yang bergerak dibidang industri makanan sedikit meningkat dari 8,50% menjadi 10,46%; sementara itu responden yang bergerak dibidang jasa menurun dari 26,14% menjadi 14,71%. Perubahan persentase ini menunjukkan bahwa, terdapat responden yang beralih usaha dari jasa ke perdagangan.

Peralihan usaha ini dapat dipahami, mengingat dengan latar belakang pendidikan yang bersifat umum, usaha yang paling mungkin dipilih adalah perdagangan; sementara usaha lainnya yang membutuhkan keahlian teknis tertentu seperti kerajinan dan

perbengkelan relatif tidak berubah. Dengan kecenderungan demikian, di waktu mendatang, akan semakin banyak orang yang bergerak dibidang perdagangan. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang semakin tinggi, sehingga dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Hal ini perlu diantisipasi dengan cara mendorong penerima bantuan berikutnya untuk memasuki jenis usaha lain, utamanya jenis usaha dengan ketrampilan teknis tertentu, dimana pangsa pasarnya masih terbuka, pelaku usahanya relatif terbatas, dan nilai yang diperoleh relatif tinggi. Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang melalui dinas terkait, perlu menyiapkan paket-paket pelatihan ketrampilan, yang memungkinkan para penerima bantuan berikutnya dapat memasuki usaha seperti industri pengolahan skala mikro dan kecil, pertukangan, perbengkelan, kerajinan dan sektor produksi lainnya.

b) Pengelolaan Usaha

Pengelolaan usaha responden pada umumnya belum baik, utamanya berkaitan dengan pilihan tempat usaha, curahan waktu kerja, pelaksanaan usaha dan penatausahaan keuangan.

1. Pilihan Tempat Usaha

Kelompok responden yang paling dominan yaitu usaha dagang, pada umumnya memilih tempat usaha dirumah atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk mendirikan tempat usaha. Pilihan ini sesuai dengan kemampuan responden, tetapi kurang memperhitungkan keberadaan pembeli. Dengan kecenderungan penambahan usaha dagang yang semakin tinggi, dapat mengakibatkan penumpukan usaha pada areal tertentu disekitar pemukiman. Pada sisi lain, dengan kondisi kepadatan permukiman yang semakin tinggi, dapat menimbulkan gangguan dari segi lingkungan dan penataan ruang.

Untuk mengantisipasi gangguan terhadap lingkungan dan penataan ruang, serta untuk menciptakan kelancaran arus orang dan kendaraan, terutama untuk kepentingan evakuasi bila terjadi kondisi ekstrim tertentu, maka perlu dipikirkan penempatan usaha pada areal tertentu.

2. Pelaksanaan Usaha

Sebagian besar responden (77,45%) mengerjakan usahanya sendiri (tanpa bantuan orang lain atau tanpa menggunakan tenaga kerja). Hal ini sesuai dengan kondisi usaha

dan kemampuan mereka yang relatif terbatas. Kondisi demikian mengharuskan responden harus menyiapkan semua hal berkaitan dengan usahanya, akibatnya waktu menjalankan usaha relatif terbatas. Masih terdapat proporsi responden yang cukup besar (41,83%) dengan curahan waktu kerjanya belum optimal, yaitu antara 1 – 6 jam dalam satu hari.

Mengerjakan usaha sendiri dalam kondisi dimana skala usaha masih relatif kecil, merupakan pilihan yang rasional. Namun dalam kaitannya dengan curahan waktu kerja, sejatinya responden masih dapat menambah jam kerja, terutama pada responden yang bergerak dibidang perdagangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, kelompok responden ini kerap menutup usahanya, karena terdapat acara lain yang harus diikuti, dan terdapat juga responden yang secara sadar tidak menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu. Pada kelompok responden jenis ini, perbaikan etos kerja melalui pendampingan menjadi sangat penting, agar mereka dapat mengoptimalkan curahan waktu kerjanya.

3. Penatausahaan Keuangan

Pada umumnya responden belum mempraktikkan penatausahaan keuangan dengan baik. Proporsi responden yang tidak melakukan pencatatan usaha secara teratur sebanyak 66,34%; yang tidak perhitungan rugi/laba secara teratur sebanyak 73,53% dan yang belum melakukan pemisahan pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan usaha sebanyak 75,16%.

Praktik penatausahaan keuangan seperti ini menyebabkan pengendalian usaha tidak dapat dilakukan dengan baik dan pengamanan aset usaha kurang memadai. Dampaknya adalah responden akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat; seberapa besar keuntungan atau kerugian yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan usaha yang dibuat responden hanya didasarkan pada berapa banyak uang tunai yang tersedia, bukan hasil perhitungan rugi/laba. Keputusan usaha yang dibuat dengan cara seperti ini masih dimungkinkan untuk skala usaha yang relatif kecil, namun sejalan dengan semakin besarnya skala usaha, praktik penatausahaan keuangan seperti ini sangat rawan terhadap praktik salah urus.

Untuk mengatasi hal ini, pendampingan terhadap responden untuk perbaikan penatausahaan keuangan perlu dipikirkan dengan baik. Berdasarkan pengalaman,

peningkatan kemampuan responden dalam penatausahaan keuangan akan efektif bila dilakukan melalui proses *learning by doing* (belajar sambil bekerja). Metode yang paling tepat untuk memastikan *learning by doing* dapat berjalan baik adalah pendampingan.

c) Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha responden dilihat dari segi penambahan modal usaha, persediaan usaha dan piutang usaha cukup baik. Pada sisi lain, pengelolaan usaha responden pada umumnya belum baik. Hal ini dimungkinkan, karena skala usaha sebagian besar responden masih terbatas, sehingga pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan usaha masih dapat dilakukan tanpa dokumentasi yang lengkap. Dengan mengandalkan apa yang diingat, dilihat dan dirasakan, responden dapat membuat keputusan dalam melaksanakan usaha.

Kondisi demikian tentunya tidak dapat dipertahankan terus. Sejalan dengan perkembangan usaha, praktik penatausahaan keuangan yang baik mensyaratkan adanya catatan tentang semua transaksi usaha. Catatan yang dimaksud dapat dibuat pada format-format yang sederhana. Kuncinya terletak pada kemauan dan kedisiplinan responden untuk melakukan pencatatan. Dengan tingkat pendidikan yang relatif baik, sejatinya responden dapat diperkuat melalui pendampingan untuk menerapkan praktik pengelolaan, pelaksanaan usaha serta penatausahaan keuangan yang baik.

d) Pendapatan Responden

Rata-rata penerimaan bersih usaha seluruh responden sebesar Rp. 7.751.961 per bulan. Angka rata-rata ini didapatkan dari selang interval penerimaan bersih usaha paling rendah sebesar Rp. 1.200.000 per bulan dan penerimaan bersih usaha paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.- per bulan. Penerimaan bersih atau keuntungan tersebut, rata-rata Rp. 2.648.039 (34,16%) per bulan digunakan untuk menambah modal, dan rata-rata Rp. 5.103.922 (65,84%) digunakan untuk menambah pendapatan keluarga dan digunakan untuk konsumsi.

Dilihat dari proporsinya, jumlah penerimaan bersih usaha yang digunakan menambah modal relatif lebih kecil dibanding untuk kepentingan konsumsi. Hal ini dapat dipahami, karena sebagian responden secara riil memiliki pendapatan yang relatif kecil. Secara teoritis, hal ini dapat dibenarkan, bahwa dalam kondisi dimana pendapatan

rumah tangga relatif kecil, bagian terbesar dari pendapatannya akan digunakan untuk konsumsi; sebaliknya dalam kondisi dimana pendapatan rumah tangga relatif tinggi, proporsi pendapatan yang dikonsumsi akan lebih rendah dibanding proporsi yang ditabung.

Dalam kaitan dengan pengembangan usaha responden, diperlukan adanya akumulasi kapital yang berasal dari pendapatannya sendiri. Karena itu, upaya untuk terus mendorong responden dalam meningkatkan pendapatannya melalui pendampingan untuk perbaikan proses pelaksanaan usaha, perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perbaikan dalam proses pelaksanaan usaha akan menciptakan efisiensi usaha dan dampaknya akan tampak pada peningkatan pendapatan responden. Semakin meningkat pendapatan responden, proporsi pendapatan yang digunakan untuk menambah modal akan semakin besar, sehingga memberi peluang bagi mereka untuk memperbesar kapasitas usahanya.

BAB IV

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN USAHA RESPONDEN

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan elaborasi hasil analisis data sebagaimana disajikan dalam Bab III, maka pada bagian berikut ini disampaikan hasil identifikasi beberapa permasalahan pokok terkait usaha responden.

1. Pilihan Jenis Usaha

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagian besar responden memilih usaha dagang; sementara jenis usaha lainnya yang berbasis ketrampilan khusus masih terbatas. Bila kecenderungan memilih jenis usaha dagang terus berlanjut, pada akhirnya akan menimbulkan penumpukan usaha yang berdampak pada penurunan omzet penjualan. Karena itu, perlu dipikirkan alternatif usaha diluar usaha dagang yang relatif terbuka dan memiliki nilai tambah yang relatif besar, serta model pelatihan dan pendampingan yang tepat bagi calon penerima bantuan berikutnya, sehingga penumpukan pada usaha dagang dapat dihindari.

2. Pengelolaan Usaha

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pilihan tempat usaha, curahan waktu kerja, pelaksanaan usaha dan penatausahaan keuangan.

a) Pilihan Tempat Usaha

Sebagian besar responden memilih usaha dagang, yang pada umumnya menggunakan rumah sebagai tempat usaha atau memanfaatkan pekarangan rumah. Pilihan ini sesuai dengan kemampuan responden, tetapi kurang memperhitungkan keberadaan pembeli. Dalam jangka menengah dan panjang, akan menimbulkan permasalahan terkait aspek lingkungan dan penataan ruang. Permasalahannya adalah: (a) responden tidak memiliki alternatif tempat usaha yang dapat dijangkau dengan kemampuan mereka; (b) ruang serta sarana dan prasarana untuk menampung aktivitas usaha bagi mereka juga belum tersedia secara memadai. Karena itu, ke depan, perlu dipikirkan penyediaan ruang serta pembangunan sarana dan prasarana untuk menampung aktivitas usaha mereka.

b) Pelaksana Usaha dan Curahan Waktu Kerja

Sebagian besar responden (77,45%) mengerjakan usahanya sendiri (tanpa bantuan orang lain atau tanpa menggunakan tenaga kerja). Kondisi demikian mengharuskan responden harus menyiapkan semua hal berkaitan dengan usahanya, akibatnya waktu menjalankan usaha relatif terbatas. Masih terdapat proporsi responden yang cukup besar (41,83%) dengan curahan waktu kerjanya belum optimal, yaitu antara 1 – 6 jam dalam satu hari.

Mengerjakan usaha sendiri dalam kondisi dimana skala usaha masih relatif kecil, merupakan pilihan yang rasional. Namun dalam kaitannya dengan curahan waktu kerja, sejatinya responden masih dapat menambah jam kerja, terutama pada responden yang bergerak dibidang perdagangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, kelompok responden ini kerap menutup usahanya, karena terdapat acara lain yang harus diikuti, dan terdapat juga responden yang secara sadar tidak menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu. Pada kelompok responden jenis ini, permasalahan yang dihadapi adalah belum kuatnya etos kerja mereka. Karena itu perlu dipikirkan model pendampingan yang mampu memperkuat etos kerja mereka.

c) Penatausahaan Keuangan

Pada umumnya responden belum mempraktikan penatausahaan keuangan dengan baik. Proporsi responden yang tidak melakukan pencatatan usaha secara teratur sebanyak 66,34%; yang tidak perhitungan rugi/laba secara teratur sebanyak 73,53% dan yang belum melakukan pemisahan pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan usaha sebanyak 75,16%.

Praktik penatausahaan keuangan seperti ini menyebabkan pengendalian usaha tidak dapat dilakukan dengan baik dan pengamanan aset usaha kurang memadai. Dampaknya adalah responden akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat; seberapa besar keuntungan atau kerugian yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan usaha yang dibuat responden hanya didasarkan pada berapa banyak uang tunai yang tersedia, bukan hasil perhitungan rugi/laba. Keputusan usaha yang dibuat dengan cara seperti ini masih dimungkinkan untuk skala usaha yang relatif kecil, namun sejalan dengan semakin besarnya skala usaha, praktik penatausahaan keuangan seperti ini sangat rawan terhadap praktik salah urus.

Untuk mengatasi hal ini, pendampingan terhadap responden untuk perbaikan penatausahaan keuangan perlu dipikirkan dengan baik. Berdasarkan pengalaman, peningkatan kemampuan responden dalam penatausahaan keuangan akan efektif bila dilakukan melalui proses *learning by doing* (belajar sambil bekerja). Metode yang paling tepat untuk memastikan *learning by doing* dapat berjalan baik adalah pendampingan.

3. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha yang dimaksud dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu peningkatan skala usaha (ekspansi usaha) dan diversifikasi usaha. Sejumlah responden telah menunjukkan adanya peningkatan skala usaha dan sebagian kecil responden telah melakukan diversifikasi usaha. Permasalahan yang mereka hadapi adalah (a) penguasaan kemampuan teknis untuk melakukan diversifikasi usaha, (b) kemampuan manajerial yang belum memadai untuk melakukan ekspansi usaha, serta (c) akumulasi modal yang terjadi belum memadai untuk melakukan ekspansi usaha.

Antisipasi terhadap ketiga permasalahan tersebut perlu dilakukan melalui pendekatan pelatihan yang mengarah pada pembentukan kemampuan teknis, pementapan kemampuan manajerial dan memberi peluang pendanaan ulang bagi responden yang memiliki prospek usaha yang baik.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan Hasil Kajian

Berdasarkan penyampaian hasil analisis data dan elaborasi hasil analisis yang telah disampaikan pada bab terdahulu, berikut ini dapat disampaikan kesimpulan hasil kajian sebagai berikut.

a) Realisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) 2013

- Pada tahun 2013, dialokasi anggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 15.000.000.000.- dan berhasil disalurkan Rp. 14.697.000.000 atau 97,98%, sisanya sebesar Rp. 74.740.000 (2,12%) adalah dana *force majeure*.
- Tingkat pengembalian (lunas) relatif tinggi, yaitu 88,03%; sisanya sedang dalam proses mencicil.
- Perguliran dana berjalan baik; tercatat telah 3 (tiga) kali perguliran, dengan akumulasi penyaluran sebesar Rp. 9.311.800.000 atau 63,36% dari penyaluran awal.
- Cicilan perguliran I – III masih rendah.
- Secara keseluruhan, tingkat pengembalian penyaluran awal dan perguliran (I – III) sebesar 61,12%.

b) Profil Responden Penerima Dana PEM

1) Usia dan Tingkat Pendidikan

- Pada umumnya responden penerima bantuan pemberdayaan ekonomi berada pada usia produktif dan berpendidikan cukup memadai.

2) Profil Usaha Penerima Dana PEM

- Sebagian besar responden memilih usaha dagang dan jasa.
- Sebagian besar responden menerima bantuan pada kategori Rp. 1.000.000 - Rp. 5.000.000.-
- Pada umumnya tingkat pengembalian cukup baik. Responden yang telah melunasi kewajibannya sebanyak 62,09%

3) **Pengelolaan Usaha**

- Sebagian besar responden memilih jenis usaha atas inisiatif sendiri, dengan pertimbangan utama mudah dikerjakan dan sesuai keahlian/pengalaman.
- Sebagian besar responden memiliki tempat usaha dengan status milik sendiri.
- Sebagian besar responden mengelola sendiri usahanya; responden yang menggunakan tenaga kerja relatif sedikit.
- Waktu yang digunakan responden untuk berusaha relatif pendek; sekitar 44,44% responden bekerja antara 1 – 6 jam per hari.
- Pada umumnya responden menjual secara tunai, hanya sebagian kecil responden dengan modal yang relatif besar yang menggunakan penjualan tunai dan kredit.

4) **Penatausahaan keuangan**

- Pencatatan usaha belum dilakukan secara tertib dan teratur oleh responden.
- Sebagian besar responden belum menggunakan jasa bank untuk menyimpan hasil transaksi setiap hari/minggu.
- Sebagian besar responden tidak melakukan perhitungan selisih transaksi setiap harinya.
- Sebagian besar responden tidak tertib dalam memisahkan pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha.

c) **Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) 2013**

1) **Perkembangan Skala Usaha Responden**

- Rata-rata skala usaha responden meningkat, terutama pada responden yang menerima bantuan diatas Rp. 10.000.000.-
- Rata-rata persediaan usaha responden meningkat, terutama pada responden yang menerima bantuan di atas Rp. 10.000.000.-
- Rata-rata piutang usaha responden meningkat, terutama pada responden yang menerima bantuan diatas Rp. 10.000.000.-

2) **Pendapatan Responden**

- Rata-rata omzet penjualan responden meningkat, berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan; dengan rata-rata pendapatan bersih Rp. 7.751.961. Namun perlu dicatat bahwa kontribusi terbesar terhadap keuntungan rata-rata

diberikan oleh responden dengan modal di atas Rp. 10.000.000 dan omzet penjualan di atas Rp. 15.000.000.-

- Sebagian besar responden menggunakan pendapatan bersihnya untuk konsumsi (65,84%); dan 34,16% digunakan untuk menambah modal.
- Pada umumnya responden dengan modal di atas Rp. 10.000.000 dan omzet penjualan di atas Rp. 15.000.000.- menggunakan presentase pendapatan bersih usaha yang lebih besar untuk menambah modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous (2005) Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Biro Kredit Bank Indonesia.
- Anonymous (2006). Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah (FPESD), Best Practice Pengembangan Klaster di Jawa Tengah. (working paper)
- Anonymous (2006). Laporan Akhir Kajian Pembiayaan Dalam Rangka Pengembangan Klaster. Biro Kredit Bank Indonesia.
- Ardiansyah, Saleh. (2007). Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Ghalia Indah: Jakarta.
- Badrudin, Hanafi, dkk. (2010). Keefektifan Pemanfaatan Bantuan Permodalan dalam Rangka Peningkatan Kinerja Usaha Pelaku Ekonomi Kecil, Studi Kasus di Kota Solo; Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen, UNS Solo.
- Handoko, Siswoyo. (2011). Penuntun Penatausahaan Keuangan bagi Usaha Mikro dan Kecil; Model Pelatihan Kewirausahaan, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, Unibraw Malang.
- Mahman, Syamsurizal dan Zuriati (2004). Modul Loklatih Pembentukan Dan Pengembangan Klaster Ekonomi Lokal (Editor: Dr. Ir. Astia Dendi) PROMIS-NT - GTZ
- Supratikno, H. (2002). The Strategies of Cluster Upgrading in Central Java. A Preliminary Report to Deperindag, Salatiga. 2002.
- Tambunan, Tulus. (2009). Kerangka Konseptual Model Pengembangan Usaha Mikro-Kecil; Bahan Lokakarya Pengembangan Usaha Mikro-Kecil, Badan Litbang Dep. Koperasi dan UKM.
- Taufik, T.A. (2007). Pengenalan tentang Bagaimana Mengembangkan Klaster Industri di Daerah. Presentasi Sosialisasi tentang Klaster Industri di Palu, 6 September 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, No, 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Keputusan Walikota Kupang No. 1/Kep/HK/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kupang No. 15A/Kep/HK/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang